



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

Pages : 3183–3188

Dampak Pembangunan PIK 2 terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Lokal

Saifun Nufus

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Primagraha

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3105>

How to Cite this Article

APA : Nufus, S. . (2025). Dampak Pembangunan PIK 2 terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Lokal. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3183 – 3188. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3105>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Dampak Pembangunan PIK 2 terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Lokal

Saifun Nufus

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Primagraha

*Email Korespondensi: saifunnufus2@gmail.com

Diterima: 18-02-2025

| Disetujui: 19-02-2025

| Diterbitkan: 20-02-2025

ABSTRACT

One of the national strategic projects (PSN) is the development of Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), which is a mega project aimed at creating new growth that significantly impacts various aspects, including the economic, social, and cultural rights of the local community. This research aims to determine the impact of the PIK2 development from the perspective of the economic, social, and cultural rights of the local community, whether this development incorporates aspects of integration and sustainability in accordance with its vision. The method used is a qualitative method with a literature review approach. The research results indicate that the development of PIK 2 can damage coastal ecosystems and pose challenges related to social justice and community participation in planning and decision-making. This study concludes that there is a more just and transparent approach to incorporating environmental sustainability at every stage of the PIK 2 development to achieve progress.

Keywords: violations of economic and social rights, development of PIK 2, community culture.

ABSTRAK

Salah satu proyek strategis nasional (PSN) adalah pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), yang merupakan mega proyek yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan baru yang berdampak signifikan pada berbagai aspek, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dampak pembangunan PIK2 dari perspektif hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat, apakah pembangunan ini menggabungkan aspek integrasi dan keberlanjutan sesuai dengan visinya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan PIK 2 dapat merusak ekosistem pesisir dan menimbulkan tantangan terkait keadilan sosial serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Studi ini menyimpulkan bahwa ada pendekatan yang lebih adil dan transparan dalam mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan di setiap tahap pengembangan PIK 2 untuk mencapai kemajuan.

Katakunci: pelanggaran hak ekonomi dan sosial, pengembangan PIK 2, budaya masyarakat.

PENDAHULUAN

Pengembangan daerah baru yang berkembang di Indonesia menyangkut topik penting dalam penelitian pembangunan perkotaan, baik dalam hal ekonomi, masalah sosial dan lingkungan. Salah satu proyek pembangunan terpenting yang terjadi adalah pengembangan area Pantai Indah Kapuk 2 (Pik 2). Pik 2 yang terletak di distrik Kosambi Tangerang dan akan menjadi pusat pertumbuhan baru dengan berbagai fasilitas termasuk apartemen, pusat perdagangan, dan infrastruktur. Perkembangan ini memiliki potensi untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak yang tidak dapat diprediksi, terutama dalam hal sumber daya alam dan budaya masyarakat lokal.

Pik 2 berada di wilayah yang sebelumnya memiliki ekosistem pantai yang indah dan berbagai sumber daya alam, seperti hutan bakau dan ekosistem laut lainnya. Pengembangan daerah ini memiliki potensi untuk mengubah struktur ekologis sebuah wilayah, yang dapat berdampak besar pada keberlanjutan sumber daya alam. Penggunaan dan pengelolaan Pik 2 sangat penting karena pengabaian keberlanjutan dapat berdampak negatif pada keberlanjutan ekologi lokal dan kualitas hidup masyarakat.

Dari sudut pandang warga, pengembangan PIK 2 melibatkan hak dan kewajiban penduduk lokal selain pengembangan infrastruktur. Citizenship berarti berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, melindungi hak-hak sosial, dan melindungi hak-hak lingkungan. Untuk memastikan bahwa proyek dapat membawa manfaat yang adil bagi masyarakat di semua tingkatan yang penting, komunitas lokal semakin terlibat dalam proses pengembangan seiring dengan peningkatan urbanisasi dan pengembangan wilayah baru seperti Pik 2.

Selain itu, dampak pembangunan PIK 2 terhadap masyarakat juga mencakup akses masyarakat terhadap fasilitas dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Jika pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan keadilan sosial dan ekonomi, itu dapat menyebabkan ketidaksamaan antara kelompok masyarakat tertentu, seperti masyarakat lokal yang tinggal di sekitar lokasi dengan investor atau orang asing yang terlibat dalam proyek. Oleh karena itu, analisis Penulis adalah penting untuk menentukan sejauh mana pembangunan PIK 2 memperhatikan elemen kemasyarakatan terkait dengan kesetaraan akses dan partisipasi warga.

Karena proyek skala besar, ketidaksetaraan sosial yang mungkin terjadi selama proses pengembangan harus dipertimbangkan, terutama berlaku untuk distribusi pembangunan yang tidak merata dalam pengembangan. Untuk menciptakan kebijakan yang adil dan terintegrasi, pemahaman yang mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan PIK 2 sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang adil.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mengintegrasikan elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan di setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek, harus dipertimbangkan saat membangun PIK 2. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek tetapi juga dapat mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Akibatnya, penting untuk melakukan analisis menyeluruh tentang dampak jangka panjang dari pembangunan ini terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam (Abigail et al., 2024).

Sumber daya alam sekitar PIK 2, seperti wilayah mangrove dan pantai, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis wilayah. Namun, pembangunan yang pesat dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki, seperti kehilangan habitat alami, penurunan kualitas air, dan kerusakan biodiversitas. Reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang sedang dilakukan sesuai

dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Kapuk Naga. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan metode yang dapat mengurangi efek samping lingkungan dan memastikan keberlanjutan ekosistem pesisir. Hal tersebut diwarnai penolakan oleh berbagai element masyarakat berdasarkan analisis dampak lingkungan, reklamasi berpotensi memberi dampak buruk bagi lingkungan (Sasongko et al., 2014).

KAJIAN TEORITIS

Pembangunan PIK 2 berdampak pada perekonomian masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu aspek dalam teori ini peran penting infrastruktur yang dianggap sebagai pendorong efisiensi produksi dan distribusi pembangunan sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Pembangunan PIK2 menggambarkan tentang yang diidentifikasi dalam teori modernisasi seperti kesenjangan ekonomi, sosial, dan dampak budaya masyarakat lokal. Meskipun kawasan ini mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah, manfaatnya seringkali tidak disalurkan secara merata. Proses modernisasi dalam konteks ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan inklusivitas, yang merupakan aspek penting dalam pembangunan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menjelaskan seberapa efektif berbagai program dan kebijakan pemerintah untuk menangani PSN terhadap Proyek Pembangunan PIK-2 dan dampak PSN PIK-2 terhadap ekonomi Indonesia. Proses analisis ini menelaah pola dan hubungan serta untuk memahami dampak pembangunan PIK 2 terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal, literatur yang ada diperiksa secara kritis. Peneliti akan mengidentifikasi dampak lingkungan dan sosial-ekonomi yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak pembangunan PIK 2 terhadap pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal.

Salah satu Mega proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, bertujuan untuk membangun wilayah kota yang modern dan berkelanjutan. Di satu sisi, pembangunan yang dianggap sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan membuka lebih banyak peluang lapangan pekerjaan selama proses pembangunan. Namun sebaliknya dengan adanya pembangunan PIK 2 membuat masyarakat kehilangan mata pencahariannya hak ekonomi nelayan dan budaya masyarakat lokal mulai tergerus.

Jika ditelisik dari dampak pembangunan ini tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 6: Menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mencakup hak atas makanan yang layak, perumahan yang layak, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, hak untuk berperan dalam kehidupan budaya, hak atas air dan sanitasi, dan hak atas pekerjaan..

Dimana pembangunan PIK 2 ternyata berpotensi mempengaruhi terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal. Jika tidak dikelola dengan baik, pembangunan ini dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap perekonomian, sosial dan budaya masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dapat menimbulkan masalah terhadap pendapatan masyarakat dan kerusakan budaya masyarakat lokal.

Besarnya ancaman terhadap sumber daya alam akibat alih fungsi lahan yang akan terjadi selama pembangunan PIK 2 serta potensi kerusakan ekosistem di sekitarnya, niscaya akan berdampak signifikan pula terhadap wilayah di sekitarnya. Pengembangan PIK2, termasuk pemulihan hutan mangrove, dapat membahayakan keberlanjutan ekosistem dan merusak lingkungan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Apabila reklamasi lahan membahayakan ekosistem penting seperti hutan bakau dan fungsi penyangga alamnya, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Dampak dari peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa komunitas sedang mengalami beberapa fenomena yang tidak sejalan dengan hak hidup yang dimiliki oleh seluruh orang. Dimana semua masyarakat memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang sehat dan aman. Pembangunan yang merugikan lingkungan, seperti polusi udara, air, dan tanah, atau kerusakan yang mengancam kelangsungan hidup ekosistem, dapat melanggar hak ini. Dimana hal tersebut melanggar hak hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perspektif warga negara mencakup hak masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam di wilayah mereka. Pembangunan PIK 2, terutama yang melibatkan penggusuran masyarakat dan perubahan penggunaan lahan dalam skala besar, kerap kali memicu ketegangan terkait pelanggaran hak sipil. Pelanggaran hak sipil yang dirasakan warga Desa Muara akibat pembangunan PIK2 antara lain:

1. Pembangunan tembok perbatasan yang tingginya sekitar 10 kaki, telah memberikan dampak besar pada masyarakat sekitar. Karena jalan yang biasanya digunakan penduduk setempat kini ditutup, para nelayan tradisional terpaksa menempuh jarak yang jauh untuk mencapai laut. Keberadaan tembok pemisah tersebut tentu saja menyulitkan masyarakat dalam mengakses jalan raya. Sekalipun jalanan dapat dilalui, pembangunan tembok perbatasan ini akan membatasi akses ke jalanan tersebut, dan struktur jalan yang rusak juga akan menghalangi akses kendaraan bagi masyarakat setempat. Kelompok yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut seperti nelayan, kuli angkut, dan pedagang ikan niscaya akan merasakan langsung perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan PIK 2 (Suryansyah, 2024). Sulit bagi mereka untuk mengakses tempat mereka mencari nafkah. Tentu saja, ini juga berarti bahwa akses pengelolaan daya dibatasi.
2. Mata pencaharian yang rawan hilang, kawasan yang dialihfungsikan atau direklamasi selama pembangunan PIK 2 merupakan salah satu kawasan hutan mangrove yang dilindungi. Hutan bakau juga menyediakan mata pencaharian bagi penduduk setempat. Pengamat sosial Spaldiono mengatakan proyek berskala besar seperti PIK 2 berisiko menciptakan ketimpangan sosial yang lebih besar antara si kaya dan si miskin. Menurutnya, proyek tersebut telah mempengaruhi keseimbangan sistem masyarakat akibat perubahan budaya dan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat. Ketika restorasi habitat menjadi sulit dan sebagian besar ekosistem laut yang mendukung penghidupan mereka hilang, komunitas harus mencari pekerjaan alternatif. Meskipun PIK 2 menawarkan pekerjaan

sebagai pembersih taman, penyiram taman, satpam, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan usaha di kawasan PIK 2, namun masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap peluang tersebut dan merasakan dampak dari mata pencaharian tradisional mereka sebagai nelayan terancam.

3. Penyimpangan hak atas tempat tinggal yang layak huni, masyarakat yang terkena dampak penggusuran dan perubahan penggunaan lahan berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk perumahan mereka. Jika pengembangan PIK 2 dilakukan tanpa kompensasi yang memadai dan prosedur pemukiman kembali yang tepat, hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hak-hak sipil penghuni. Masyarakat juga mempunyai hak untuk menerima informasi yang jelas tentang dampak pembangunan terhadap kelangsungan hidup mereka. Misalnya saja dengan dibangunnya proyek PIK 2, rumah warga kini juga dibatasi tembok setinggi 10 kaki. Kehadiran tembok tinggi dijudika menghambat aliran udara warga. Akibatnya, tempat tinggal warga semakin sumpek (Zahira, n.d.).

Hal ini tentu saja melanggar Pasal 40 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal yang sama menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak untuk hidup dan kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia"* (KOMNAS HAM RI, 2022). Keberadaan tembok perbatasan tersebut telah memutus batas rumah penduduk, sehingga sirkulasi udara menjadi terbatas dan membuat penduduk tidak sehat. Selain itu, masyarakat yang tinggal di dekat bangunan PIK 2 juga terkena dampak polusi udara.

Warga sekitar harus menghirup udara tercemar setiap harinya yang dikeluarkan oleh mobil dan truk yang melewati pembangunan PIK 2, ini juga tidak baik untuk kesehatan orang-orang yang masih tinggal di area. Setiap masyarakat di wilayah tersebut tentunya mempunyai hak atas tempat tinggal yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan layak. Selain itu, masyarakat yang tinggal di dekat bangunan PIK 2 juga terkena dampak polusi udara. Warga sekitar harus menghirup udara tercemar setiap harinya yang dikeluarkan oleh mobil dan truk yang melewati pembangunan PIK 2. ini juga tidak baik untuk kesehatan orang-orang yang masih tinggal di area. Setiap masyarakat di wilayah tersebut tentunya mempunyai hak atas tempat tinggal yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan layak.

Dengan memahami dampak pembangunan PIK 2 dari ketiga perspektif ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana proyek pembangunan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sambil mengurangi dampak negatifnya. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mengoptimalkan manfaat pembangunan PIK 2 sambil mengurangi kerugian terhadap sumber daya alam.

KESIMPULAN

Karena proyek PIK 2 cenderung mengutamakan pembangunan kawasan elit, yang dapat meminggirkan masyarakat sekitarnya, dari perspektif warga pembangunan PIK 2 dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Jika akses ke lahan dan fasilitas menjadi terbatas, masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam dan sektor informal berisiko kehilangan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan prinsip pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat lokal akan diimbangi melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kepentingan bersama.

SARAN

Evaluasi Dampak Lingkungan yang Mendalam Sebelum proyek dimulai, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat dan terbuka diperlukan. Kenali dan atasi bahaya yang mungkin terjadi pada ekosistem, termasuk kehilangan hutan bakau dan habitat laut. Pengawasan yang Ketat terhadap Pelaksanaan selama proyek dijalankan untuk memastikan bahwa semua aspek lingkungan dan sosial diperhatikan, dan untuk menghindari intimidasi atau perampasan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigail dkk, 2024, Jurnal "Analisis Dampak Pembangunan Pik 2 Dalam Perspektif Sumber Daya Alam Dan Kewargaan", Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. hlm. 1
- Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang. (n.d.).
- Sasongko, D. A., Kusmana, C., & Ramadan, H. (2014, Juli). Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Angke Kapuk. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, hlm 4.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA.
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN.
- Suryansyah. (2024, November). Kebijakan PIK 2 Sebagai PSN Menuai Kontroversi: Ancaman Ketimpangan Sosial dan Hilangnya Mata Pencaharian. Monitor Depok. <https://www.monitordepok.co/kebijakan-pik-2-sebagai-psn-menuai-kontroversi-ancaman-ketimpangansosial-dan-hilangnya-mata-pencaharian>.
- Zahira, N. (n.d.). Di Balik Pembangunan PIK 2, Ada Tembok Tinggi yang Tutup Akses Warga. Datakata.co.id. Retrieved Agustus, 2023, from <https://katadata.co.id/berita/industri/64c9e5b4bf260/di-balikpembangunan-pik-2-ada-tembok-tinggi-yang-tutup-akses-warga>.
- 11 KOMNAS HAM RI. (2022). Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 11 Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak.
- KOMNAS HAM RI. (2022). Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 11 Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak.